SINERGITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DENGAN KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA CUKAI TIPE MADYA PABEAN C PROBOLINGGO DALAM MEMBERANTAS PEREDARAN ROKOK ILEGAL DI KABUPATEN LUMAJANG

Avrilia Budiar Garda Princessa
NPP. 33.0525
Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong
Email: avriliasesa@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Dr. Ninuk Triyanti, SH., M.Hum
Email: ninuk.za@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement (GAP): *The circulation of illegal cigarettes in Lumajang Regency is still rampant and causes state losses, disrupts healthy business competition, and has the potential to disrupt public peace and order. Although a joint operation has been carried out by the Lumajang Regency Civil Service Police Unit (Satpol PP) and the Customs and Excise Supervision and Service Office (KPPBC) of Intermediate Type C Customs C Probolinggo, the circulation of illegal cigarettes is still found so that effective synergy between agencies is needed.* ***Purpose :*** *This study aims to describe and analyze the synergy between Satpol PP Lumajang Regency and KPPBC Intermediate Type C Customs Probolinggo in eradicating the circulation of illegal cigarettes and identifying its inhibiting factors.* ***Methods:*** *The research used a descriptive qualitative method with synergy theory analyzed through indicators of effective communication, feedback, trust, and creativity. Data collection was carried out through interviews, observations, documentation, and triangulation.* ***Results:*** *The results of the study show that the synergy of the two agencies has been running through communication and coordination in joint operations to eradicate illegal cigarettes. Communication is carried out through the exchange of information and the division of tasks according to authority. Feedback is realized through joint evaluation after the implementation of the operation. Trust is reflected in the commitment and support between agencies in the implementation of tasks. Creativity is realized through the use of the Tobacco Product Excise Revenue Sharing Fund (DBHCHT), socialization to the community, and the development of operational strategies. However, there are still obstacles in the form of limited human resources, leakage of operational information, low public awareness, and difficulty tracing illegal cigarette suppliers.* ***Conclusion :*** *The synergy between Satpol PP Lumajang Regency and KPPBC Intermediate Type C Customs Probolinggo has been running quite well in supporting the eradication of illegal cigarettes. However, its effectiveness still needs to be improved through strengthening coordination, increasing the capacity of human resources, securing operational information, and education and community participation.*
Keywords: *Customs, Public Order and Order, Illegal Cigarettes, Satpol PP, Synergy.*

ABSTRAK

Permasalahan (GAP): Peredaran rokok ilegal di Kabupaten Lumajang masih marak dan menimbulkan kerugian negara, mengganggu persaingan usaha yang sehat, serta berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum. Meskipun telah dilakukan operasi bersama oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Lumajang dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Probolinggo, peredaran rokok

ilegal masih ditemukan sehingga diperlukan sinergitas yang efektif antarinstansi. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis sinergitas Satpol PP Kabupaten Lumajang dengan KPPBC Tipe Madya Pabean C Probolinggo dalam memberantas peredaran rokok ilegal serta mengidentifikasi faktor penghambatnya. **Metode:** Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teori sinergitas yang dianalisis melalui indikator komunikasi efektif, umpan balik, kepercayaan, dan kreativitas. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan triangulasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas kedua instansi telah berjalan melalui komunikasi dan koordinasi dalam operasi gabungan pemberantasan rokok ilegal. Komunikasi dilakukan melalui pertukaran informasi dan pembagian tugas sesuai kewenangan. Umpan balik diwujudkan melalui evaluasi bersama setelah pelaksanaan operasi. Kepercayaan tercermin dari komitmen dan dukungan antarinstansi dalam pelaksanaan tugas. Kreativitas diwujudkan melalui pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), sosialisasi kepada masyarakat, dan pengembangan strategi operasi. Namun, masih terdapat hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia, kebocoran informasi operasi, rendahnya kesadaran masyarakat, dan sulitnya menelusuri pemasok rokok ilegal. **Kesimpulan:** Sinergitas Satpol PP Kabupaten Lumajang dan KPPBC Tipe Madya Pabean C Probolinggo telah berjalan cukup baik dalam mendukung pemberantasan rokok ilegal. Namun, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan koordinasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengamanan informasi operasi, serta edukasi dan partisipasi masyarakat.

Kata kunci: Bea Cukai, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, Rokok ilegal, Satpol PP, Sinergitas.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Peredaran rokok ilegal merupakan salah satu permasalahan yang terus menjadi perhatian pemerintah karena berdampak pada aspek ekonomi, hukum, dan tata kelola pemerintahan. Praktik peredaran rokok ilegal menyebabkan hilangnya penerimaan negara dari sektor cukai, menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat, serta melemahkan efektivitas kebijakan pengendalian tembakau. Menurut Ulep, Lavares, dan Francisco (2021), perdagangan tembakau ilegal tidak hanya menurunkan penerimaan negara, tetapi juga menunjukkan lemahnya kapasitas kelembagaan, pengawasan, dan tata kelola dalam mengendalikan peredaran produk tembakau ilegal. Selain itu, Arda dan Santiago (2023) menegaskan bahwa keberhasilan pemberantasan rokok ilegal sangat ditentukan oleh koordinasi antarlembaga, dukungan kebijakan pemerintah, dan penguatan struktur penegakan hukum.

Bryson et al. (2006) menjelaskan bahwa permasalahan publik yang kompleks memerlukan kolaborasi lintas sektor karena setiap organisasi memiliki keterbatasan sumber daya, informasi, dan kewenangan dalam menyelesaikan masalah secara mandiri. Oleh karena itu, keberhasilan suatu program pemerintah sangat dipengaruhi oleh kemampuan membangun kerja sama antarlembaga yang berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan temuan Lee et al. (2021) yang menyatakan bahwa keberhasilan penanganan perdagangan ilegal sangat dipengaruhi oleh kapasitas koordinasi antarorganisasi, pertukaran informasi, dan integrasi sumber daya antaraktor yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Oleh karena itu, pemberantasan rokok ilegal memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Secara normatif, kewenangan penindakan terhadap pelanggaran di bidang cukai berada pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai. Namun, dalam praktiknya, upaya pemberantasan rokok ilegal juga memerlukan dukungan pemerintah daerah melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol

PP) yang memiliki fungsi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum. Keterlibatan Satpol PP menjadi penting karena peredaran rokok ilegal tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran administrasi dan pidana di bidang cukai, tetapi juga berdampak terhadap ketertiban ekonomi dan sosial masyarakat.

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu daerah yang menjadi sasaran peredaran rokok ilegal di wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Probolinggo. Berbagai operasi gabungan yang dilakukan menunjukkan bahwa rokok tanpa pita cukai masih ditemukan pada sejumlah toko dan jalur distribusi masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal merupakan permasalahan yang kompleks karena melibatkan jaringan distribusi yang sulit dilacak, rendahnya kesadaran masyarakat, serta adanya motif ekonomi yang mendorong tingginya permintaan terhadap produk rokok ilegal.

Penelitian internasional yang dilakukan oleh Arda dan Santiago (2023) menunjukkan bahwa lemahnya koordinasi antarinstansi sering menjadi hambatan utama dalam pemberantasan perdagangan tembakau ilegal. Temuan serupa juga disampaikan oleh Ulep et al. (2021) yang menyatakan bahwa kapasitas kelembagaan dan tata kelola pemerintahan merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan pengendalian perdagangan tembakau ilegal. Sementara itu, Joossens dan Gilmore (2017) menjelaskan bahwa celah koordinasi dan pengawasan antarotoritas dapat dimanfaatkan oleh pelaku perdagangan ilegal untuk menghindari penindakan hukum. Di sisi lain, Laksono, Wulandari, dan Suhindarno (2026) menemukan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan Bea Cukai menjadi faktor kunci dalam meningkatkan efektivitas program pemberantasan rokok ilegal melalui komunikasi, koordinasi, dan pembagian peran yang jelas.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian mengenai bagaimana sinergitas antara Satpol PP Kabupaten Lumajang dan KPPBC TMP C Probolinggo dalam memberantas peredaran rokok ilegal. Kajian ini menjadi penting untuk mengetahui sejauh mana komunikasi, koordinasi, kepercayaan, dan kreativitas antarinstansi telah berjalan dalam mendukung efektivitas pemberantasan rokok ilegal, serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang masih dihadapi dalam pelaksanaannya.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (*Research GAP*)

Kesenjangan masalah dalam penelitian ini terletak pada masih terbatasnya kajian yang membahas sinergitas antara pemerintah daerah dan instansi vertikal dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal di tingkat kabupaten. Penelitian mengenai peredaran rokok ilegal selama ini lebih banyak berfokus pada aspek penegakan hukum, kebijakan cukai, dan efektivitas operasi penindakan, sedangkan kajian yang secara khusus menganalisis kualitas sinergitas antarinstansi melalui aspek komunikasi, umpan balik, kepercayaan, dan kreativitas masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian mengenai kerja sama antara Satpol PP dan Bea Cukai pada konteks lintas wilayah administratif belum banyak dikaji secara mendalam.

Secara empiris, Satpol PP Kabupaten Lumajang dan KPPBC Tipe Madya Pabean C Probolinggo telah melaksanakan berbagai operasi gabungan dalam upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal. Akan tetapi, peredaran rokok ilegal masih ditemukan di berbagai wilayah Kabupaten Lumajang. Selain itu, masih terdapat berbagai kerentanan yang dapat memengaruhi efektivitas sinergitas kedua instansi, seperti keterbatasan sumber daya manusia, sulitnya menelusuri jaringan pemasok rokok ilegal, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya dan dampak rokok ilegal, serta potensi kebocoran informasi sebelum pelaksanaan operasi. Kerentanan tersebut tidak selalu menghambat pelaksanaan operasi secara langsung, namun dapat memengaruhi efektivitas koordinasi, pengawasan, dan penindakan apabila tidak dikelola secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana sinergitas antara Satpol PP Kabupaten Lumajang dan KPPBC Tipe Madya Pabean C Probolinggo dilaksanakan dalam pemberantasan peredaran

rokok ilegal di Kabupaten Lumajang.

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran empiris mengenai sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Probolinggo dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal. Penelitian ini diperlukan karena peredaran rokok ilegal masih menjadi permasalahan yang berdampak pada berkurangnya penerimaan negara dari sektor cukai, terganggunya persaingan usaha yang sehat, serta menurunnya efektivitas penegakan hukum di daerah. Selain itu, penelitian ini penting untuk memperkaya kajian ilmu pemerintahan, khususnya mengenai sinergitas antarlembaga pemerintah dalam menangani permasalahan publik yang kompleks dan melibatkan kewenangan lintas sektor.

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang, Satpol PP, dan KPPBC Tipe Madya Pabean C Probolinggo dalam mengevaluasi dan memperkuat pola koordinasi, komunikasi, pembagian peran, serta pengelolaan sumber daya dalam pelaksanaan operasi pemberantasan rokok ilegal. Penelitian ini juga penting dilakukan saat ini mengingat perkembangan pola distribusi rokok ilegal yang semakin kompleks dan memerlukan respons kelembagaan yang lebih efektif serta terintegrasi.

Apabila penelitian ini tidak dilakukan, maka pemerintah daerah dan instansi terkait berpotensi mengalami keterbatasan informasi dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan sinergitas antarinstansi. Akibatnya, upaya pemberantasan rokok ilegal dapat berjalan kurang optimal, potensi kerugian negara akibat pelanggaran cukai dapat terus meningkat, dan efektivitas pengawasan serta penegakan hukum di daerah menjadi kurang maksimal.

1.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan sinergitas antarlembaga, kolaborasi pemerintahan, serta pemberantasan peredaran rokok ilegal.

Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Bea Cukai dalam Pemberantasan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergitas antara Satpol PP dan Bea Cukai telah berjalan melalui komunikasi, koordinasi, dan pembagian tugas yang jelas, namun masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia dan transparansi informasi. Penelitian tersebut relevan karena sama-sama membahas sinergitas antara Satpol PP dan Bea Cukai dalam pemberantasan rokok ilegal, tetapi berbeda pada lokus penelitian dan indikator analisis yang digunakan (Razak & Utama, 2025).

Collaborative Synergy Between Customs and the Government in the Program to Combat Illegal Cigarettes. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pemberantasan rokok ilegal dipengaruhi oleh kolaborasi antara Bea Cukai, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat melalui koordinasi yang terintegrasi. Penelitian ini relevan karena sama-sama mengkaji kerja sama antarinstansi dalam pemberantasan rokok ilegal, namun penelitian penulis lebih berfokus pada sinergitas kelembagaan antara Satpol PP Kabupaten Lumajang dan KPPBC TMP C Probolinggo (Laksono, Wulandari, & Suhindarno, 2026).

Efektivitas Pengawasan Rokok Ilegal pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Provinsi Riau. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengawasan melalui operasi pasar, sosialisasi, dan program Gempur Rokok Ilegal berkontribusi dalam menekan peredaran rokok ilegal. Penelitian ini relevan karena sama-sama membahas upaya pemberantasan rokok ilegal, namun lebih berfokus pada efektivitas pengawasan Bea Cukai daripada hubungan sinergitas antarlembaga (Maulana, Syamsuadi, & Hartati, 2023).

Sinergitas Bea Cukai dan Baharkam Polri dalam Mengatasi Peredaran Barang-Barang

Ilegal dan Berbahaya. Hasil penelitian menegaskan bahwa komunikasi yang efektif, kepercayaan antarlembaga, dan koordinasi yang berkelanjutan menjadi faktor penting dalam meningkatkan keberhasilan pengawasan barang ilegal. Penelitian tersebut relevan karena sama-sama membahas sinergitas antarlembaga dalam penegakan hukum, meskipun objek kajiannya berbeda dengan penelitian ini (Prasetyo, Yuhelson, & Prasetyo, 2024).

Penegakan Hukum Peredaran Minuman Mengandung Etil Alkohol dan Rokok Ilegal dalam Perspektif Pemidanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pemberantasan rokok ilegal memerlukan penguatan koordinasi antarinstansi penegak hukum serta dukungan regulasi yang konsisten. Relevansinya terletak pada pembahasan mengenai pentingnya kerja sama kelembagaan dalam mengatasi peredaran barang kena cukai ilegal (Warsono & Koswara, 2025).

Kelima penelitian tersebut menjadi pijakan bagi penelitian ini sekaligus menunjukkan bahwa kajian mengenai sinergitas antara Satpol PP Kabupaten Lumajang dan KPPBC Tipe Madya Pabean C Probolinggo dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal masih perlu dikembangkan. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada efektivitas pengawasan, kolaborasi umum, dan aspek penegakan hukum, sedangkan penelitian ini secara khusus menganalisis sinergitas antarlembaga melalui indikator komunikasi efektif, umpan balik, kepercayaan, dan kreativitas.

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dari penelitian terdahulu karena penelitian ini berfokus pada sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang dan KPPBC Tipe Madya Pabean C Probolinggo dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal. Kebaruan penelitian terletak pada karakteristik objek penelitian yang melibatkan hubungan antara perangkat daerah dan instansi vertikal dengan kewenangan yang berbeda dalam menangani permasalahan publik yang sama. Selain itu, penelitian ini menggunakan teori sinergitas dengan indikator komunikasi efektif, umpan balik, kepercayaan, dan kreativitas untuk menganalisis kualitas kerja sama antarlembaga. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih banyak menyoroti efektivitas pengawasan, penegakan hukum, atau koordinasi secara umum, penelitian ini secara khusus mengkaji faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan sinergitas dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Lumajang.

1.6 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis sinergitas Satpol PP dengan KPPBC TMP C Probolinggo dalam memberantas peredaran rokok illegal di Kabupaten Lumajang.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam proses sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Probolinggo dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai interaksi antarlembaga, pola komunikasi, koordinasi, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaan sinergitas (Creswell & Creswell, 2018). Penelitian kualitatif juga digunakan untuk memahami fenomena sosial berdasarkan perspektif aktor yang terlibat secara langsung dalam suatu peristiwa sosial maupun penyelenggaraan pemerintahan (Moleong, 2018).

Dalam perspektif Ilmu Pemerintahan, penelitian kualitatif diperlukan untuk memahami pelaksanaan fungsi pemerintahan, hubungan antaraktor pemerintahan, serta dinamika penyelenggaraan pemerintahan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan publik

(Muhadam Labolo, 2014). Pemerintahan pada hakikatnya merupakan proses interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan dalam mencapai tujuan bersama sehingga diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap proses koordinasi dan kerja sama antarlembaga (Taliziduhu Ndraha, 2011). Selain itu, hubungan antarlembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Sadu Wasistiono, 2003).

Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan yang terlibat dalam kegiatan pemberantasan rokok ilegal, yaitu pejabat dan anggota Satpol PP Kabupaten Lumajang, pejabat dan pegawai KPPBC Tipe Madya Pabean C Probolinggo, serta pihak-pihak lain yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan operasi gabungan dan pengawasan rokok ilegal. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan tingkat pengetahuan, keterlibatan, dan pengalaman terhadap objek penelitian (Sugiyono, 2023). Data sekunder diperoleh melalui dokumen resmi pemerintah, laporan kegiatan operasi gabungan, regulasi terkait cukai dan ketenteraman serta ketertiban umum, data hasil penindakan rokok ilegal, jurnal ilmiah, buku, dan berbagai sumber lain yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dokumentasi, dan triangulasi. Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi mengenai bentuk sinergitas, pola komunikasi, koordinasi, pembagian tugas, faktor pendukung, dan faktor penghambat dalam pemberantasan rokok ilegal. Observasi dilakukan untuk memahami kondisi empiris dan interaksi antarinstansi dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Dokumentasi digunakan untuk memperkuat hasil wawancara dan observasi melalui pengumpulan arsip, laporan kegiatan, foto, serta dokumen pendukung lainnya (Sugiyono, 2023).

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif yang dikemukakan oleh Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi (Miles et al., 2014). Analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak proses pengumpulan data hingga penelitian selesai sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai fenomena yang diteliti.

Kerangka analisis penelitian menggunakan teori sinergitas yang dikemukakan oleh Michael Doctorrof (1977), yang terdiri atas empat indikator yaitu komunikasi efektif (effective communication), umpan balik (feedback), kepercayaan (trust), dan kreativitas (creativity). Keempat indikator tersebut digunakan untuk menganalisis kualitas sinergitas antara Satpol PP Kabupaten Lumajang dan KPPBC Tipe Madya Pabean C Probolinggo dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Lumajang. Penggunaan teori sinergitas dalam kajian pemerintahan relevan karena penyelenggaraan pemerintahan modern menuntut adanya kolaborasi dan integrasi berbagai aktor pemerintahan dalam menyelesaikan permasalahan publik secara efektif (Djohermansyah Djohan, 2015; Irwan Tahir & Wasistiono, 2006).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) C Probolinggo dalam Memberantas Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Lumajang menggunakan teori sinergitas Michael Doctoroff. Teori ini menjelaskan bahwa sinergitas organisasi dapat tercapai melalui empat dimensi utama, yaitu komunikasi yang efektif (effective communication), umpan balik (feedback), kepercayaan (trust), dan kreativitas (creativity). Keempat dimensi tersebut digunakan untuk melihat sejauh mana hubungan kerja sama yang terbangun antara Satpol PP Kabupaten Lumajang dan KPPBC TMP C Probolinggo mampu menghasilkan kinerja bersama yang efektif dalam upaya pemberantasan

peredaran rokok ilegal.

Sebelum membahas masing-masing dimensi, perlu dipahami bahwa Kabupaten Lumajang merupakan salah satu daerah penerima Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang memiliki tanggung jawab dalam mendukung pemberantasan barang kena cukai ilegal. Pelaksanaan pengawasan dan penindakan dilakukan melalui sinergi antara pemerintah daerah dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai melalui KPPBC TMP C Probolinggo.

Tabel 1.
Hasil Penindakan Rokok Ilegal Kabupaten Lumajang Tahun 2023–2025

Tahun	Barang Bukti	Junlah Merek	Kecamatan Temuan
2023	3.710 bungkus dan 3 batang	71 merek	13 kecamatan
2024	7.199 bungkus dan 97 batang	192 merek	21 kecamatan
2025	9.407 bungkus dan 1.491 batang	215 merek	11 kecamatan

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan data dari Satpol PP Kabupaten Lumajang.

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa hasil penindakan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jumlah barang bukti yang berhasil diamankan meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, jumlah merek rokok ilegal yang ditemukan juga meningkat dari 71 merek menjadi 192 merek dan kembali meningkat menjadi 215 merek. Data tersebut menunjukkan bahwa aktivitas pengawasan dan penindakan yang dilakukan melalui sinergi antarinstansi semakin intensif.

3.1 Dimensi Komunikasi yang Efektif

Menurut Doctoroff, komunikasi yang efektif merupakan kemampuan organisasi untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan dapat diterima, dipahami, dan ditindaklanjuti oleh pihak lain tanpa mengalami hambatan yang berarti. Dalam penelitian ini komunikasi dianalisis melalui indikator pesan dapat diterima, pesan disetujui, dan tidak adanya hambatan komunikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antara Satpol PP Kabupaten Lumajang dan KPPBC TMP C Probolinggo telah berjalan secara intensif melalui rapat koordinasi, forum evaluasi, komunikasi informal, serta koordinasi teknis pada saat pelaksanaan operasi gabungan. Informasi mengenai lokasi peredaran rokok ilegal yang diperoleh Satpol PP dari masyarakat disampaikan kepada Bea Cukai untuk dilakukan verifikasi dan tindak lanjut penindakan.

Tabel 2.
Pembagian Tugas Satpol PP dan KPPBC TMP C Probolinggo

No.	Satpol PP Kabupaten Lumajang	KPPBC TMP C Probolinggo
1	Pengumpulan informasi lapangan	Analisis pelanggaran cukai
2	Sosialisasi ketentuan cukai	Penindakan pelanggaran cukai
3	Pengawasan wilayah	Penyidikan pelanggaran cukai

4	Pendampingan operasi gabungan	Penyitaan barang bukti
5	Pelaksanaan kegiatan yang didanai DBHCHT	Pembinaan teknis di bidang cukai

Sumber: PMK No 72 Tahun 2024. Diolah oleh penulis 2026.

Dimensi komunikasi yang efektif antara Satpol PP Kabupaten Lumajang dengan KPPBC TMP C Probolinggo dapat dilihat dari penerimaan pesan antar kedua instansi. Meskipun Satpol PP dengan Bea Cukai sudah melakukan koordinasi dan komunikasi secara formal dan prosedural dengan baik namun penyebaran informasi kepada petugas di lapangan masih belum bisa diserap dengan baik. Selain itu juga dalam pelaksanaannya di lapangan masih ditemukan adanya kebocoran informasi. Namun meskipun demikian koordinasi pelaksanaan antara Satpol PP dengan Bea Cukai sudah berjalan dengan cukup baik. Pesan yang diberikan oleh kedua belah pihak sejauh ini masih bisa diterima dan disetujui serta diitndaklanjuti untuk diintegrasikan ke dalam kebijakan operasional Bersama.

3.2 Dimensi Umpan Balik *(Feedback)*

Dimensi umpan balik (feedback) dalam sinergitas Satpol PP Kabupaten Lumajang dengan KPPBC TMP C Probolinggo dianalisis melalui tiga indikator, yaitu kejelasan umpan balik, kemampuan menawarkan umpan balik yang membangun, dan umpan balik yang spesifik serta dapat ditindaklanjuti. Umpan balik menjadi sarana penting untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bersama sekaligus sebagai dasar penyempurnaan strategi pemberantasan peredaran rokok ilegal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua instansi telah melaksanakan proses umpan balik melalui forum koordinasi, rapat evaluasi, penyusunan rencana kerja pemanfaatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), serta komunikasi teknis antarpetugas. Umpan balik yang diberikan umumnya bersifat jelas dan tepat waktu, terutama terkait kebutuhan percepatan koordinasi, penyederhanaan alur komunikasi, serta peningkatan respons terhadap informasi peredaran rokok ilegal di lapangan.

Selain itu, umpan balik yang disampaikan tidak hanya berupa kritik, tetapi juga memuat berbagai rekomendasi perbaikan. Satpol PP mengusulkan adanya pemberitahuan lebih awal sebelum pelaksanaan operasi gabungan, publikasi hasil kegiatan secara bersama, serta evaluasi yang tidak hanya berfokus pada jumlah barang bukti yang disita, tetapi juga memperhatikan aspek preventif melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. KPPBC TMP C Probolinggo juga memberikan masukan terkait pentingnya peningkatan efektivitas komunikasi dan koordinasi untuk mendukung pelaksanaan operasi yang lebih cepat dan efisien.

Pada indikator umpan balik yang spesifik, kedua instansi telah memanfaatkan Sistem Informasi Rokok Ilegal (SIROLEG) sebagai media pelaporan kegiatan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan SIROLEG belum optimal. Masih ditemukan laporan yang kurang rinci, ketidaksesuaian data lokasi, serta belum adanya verifikasi bersama terhadap informasi yang diinput. Kondisi tersebut menyebabkan umpan balik yang dihasilkan belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai dasar evaluasi terpadu antara Satpol PP dan KPPBC.

Secara keseluruhan, dimensi umpan balik telah berjalan dengan baik dan mendukung terwujudnya sinergitas antarinstansi. Namun, diperlukan peningkatan kualitas pelaporan melalui SIROLEG, penguatan mekanisme verifikasi data, dan optimalisasi pemanfaatan hasil evaluasi bersama agar umpan balik yang diberikan semakin spesifik, akurat, dan berorientasi pada perbaikan berkelanjutan.

Tabel 3.
Matriks Analisis Dimensi Umpan Balik (Feedback) dalam Sinergitas Satpol PP dan KPPBC TMP C Probolinggo

Indikator	Temuan Lapangan	Bukti Empiris	Tingkat Ketercapaian
Kejelasan umpan balik	Umpan balik disampaikan melalui Forum Koordinasi Pengawasan Barang Kena Cukai, rapat evaluasi DBHCHT, dan komunikasi teknis lapangan.	Terdapat forum evaluasi berkala dan komunikasi dua arah antara Satpol PP dan KPPBC.	Baik
Umpan balik yang membangun	Satpol PP mengusulkan percepatan koordinasi, pemberitahuan operasi lebih awal, publikasi bersama, dan perluasan indikator evaluasi. KPPBC mendorong peningkatan koordinasi dan komunikasi yang lebih efektif.	Adanya rekomendasi konkret yang dapat diterapkan dalam kegiatan berikutnya.	Baik
Umpan balik yang spesifik dan dapat ditindaklanjuti	SIROLEG digunakan sebagai media pelaporan dan dokumentasi kegiatan.	Sistem menyediakan kolom lokasi, jenis pelanggaran, barang bukti, hambatan, dan rekomendasi.	Cukup Baik
Tindak lanjut hasil umpan balik	Hasil evaluasi digunakan sebagai dasar penyusunan kegiatan berikutnya.	Masukan dibahas dalam rapat koordinasi dan evaluasi program DBHCHT.	Baik
Pemanfaatan sistem umpan balik	SIROLEG belum dimanfaatkan secara optimal sebagai media evaluasi bersama.	Ditemukan laporan yang belum lengkap, data lokasi kurang akurat, dan belum ada verifikasi bersama.	Kurang Optimal

Sumber: Hasil Wawancara dan Observasi Peneliti, 2026.

3.3 Dimensi Kepercayaan *(Trust)*

Kepercayaan merupakan salah satu unsur penting dalam membangun sinergitas antarinstansi. Dalam pelaksanaan pemberantasan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Lumajang, kepercayaan antara Satpol PP Kabupaten Lumajang dan KPPBC TMP C Probolinggo menjadi landasan utama dalam menciptakan kerja sama yang efektif. Kepercayaan memungkinkan kedua instansi untuk menjalankan tugas secara profesional, berbagi informasi sesuai kewenangan masing-masing, serta mendukung pelaksanaan operasi gabungan secara optimal.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, hubungan kerja sama antara Satpol PP Kabupaten Lumajang dan KPPBC TMP C Probolinggo menunjukkan tingkat kepercayaan

yang baik. Hal ini terlihat dari keterbukaan informasi pada tahap operasional, keterlibatan aktif kedua instansi dalam kegiatan bersama, serta koordinasi yang terus dilakukan setelah kegiatan berlangsung. Satpol PP memperoleh informasi yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan operasi, sedangkan KPPBC memberikan arahan teknis terkait penindakan barang kena cukai ilegal sesuai dengan kewenangannya.

Meskipun demikian, terdapat beberapa informasi yang tidak dapat diakses secara penuh oleh Satpol PP, khususnya yang berkaitan dengan proses penyidikan dan tindak lanjut hukum pasca-operasi. Kondisi tersebut bukan disebabkan oleh rendahnya tingkat kepercayaan antarinstansi, melainkan karena adanya ketentuan dan prosedur kelembagaan yang mengatur kerahasiaan informasi penyidikan di lingkungan Bea dan Cukai. Oleh karena itu, pembatasan informasi tersebut tidak memengaruhi kualitas hubungan kerja sama yang telah terjalin.

Tabel 4.
Matriks Analisis Dimensi Kepercayaan antara Satpol PP Kabupaten Lumajang dan KPPBC TMP C Probolinggo

No	Aspek Kepercayaan	Temuan Penelitian	Kondisi
1	Keterbukaan informasi operasional	Kedua instansi saling berbagi informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan operasi gabungan.	Baik
2	Keterlibatan dalam kegiatan bersama	Satpol PP dan KPPBC terlibat aktif dalam kegiatan sosialisasi, pengawasan, dan operasi gabungan.	Baik
3	Koordinasi pasca kegiatan	Terdapat komunikasi dan evaluasi lanjutan setelah pelaksanaan kegiatan.	Baik
4	Profesionalisme antarinstansi	Masing-masing instansi menjalankan tugas sesuai kewenangan dan saling menghormati batas kewenangan.	Baik
5	Akses informasi penyidikan	Informasi tertentu tidak dapat dibagikan secara penuh karena ketentuan internal KPPBC.	Cukup Baik

Sumber : Hasil Wawancara dan Observasi Penulis, 2026

3.4 Dimensi Kreativitas *(Creativity)*

Kreativitas merupakan kemampuan instansi dalam menciptakan inovasi dan pendekatan baru untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas. Dalam sinergitas antara Satpol PP Kabupaten Lumajang dan KPPBC TMP C Probolinggo, kreativitas diwujudkan melalui pengembangan berbagai metode yang mendukung pemberantasan peredaran rokok ilegal, khususnya melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk kreativitas yang paling menonjol dalam kerja sama kedua instansi adalah pemanfaatan SIROLEG (Sistem Informasi Rokok Ilegal) sebagai sarana pelaporan, dokumentasi, dan pemantauan kegiatan pemberantasan rokok ilegal. Sistem ini dikembangkan untuk mempermudah penginputan data hasil pengawasan di lapangan, termasuk informasi lokasi, dokumentasi barang bukti, serta jenis pelanggaran yang ditemukan. Kehadiran SIROLEG menunjukkan adanya upaya inovatif untuk mendukung proses pengawasan dan mempercepat pertukaran informasi antarinstansi.

Meskipun demikian, hasil observasi menunjukkan bahwa implementasi SIROLEG masih menghadapi beberapa kendala. Sosialisasi penggunaan sistem belum terlaksana secara optimal sehingga masih ditemukan petugas yang belum memahami seluruh fitur yang tersedia. Selain itu, pemanfaatan sistem sebagai media evaluasi dan pengambilan keputusan

juga belum dilakukan secara maksimal. Namun dari sisi teknis, SIROLEG dinilai telah memiliki fitur yang memadai dan mampu mendukung efektivitas pelaksanaan operasi gabungan.

3.5 Diskusi Temuan Utama

Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa sinergitas antara Satpol PP Kabupaten Lumajang dan KPPBC TMP C Probolinggo menunjukkan karakteristik network governance sebagaimana dijelaskan oleh Provan dan Kenis (2008), yaitu adanya pembagian tugas, koordinasi, serta pengelolaan hubungan antarlembaga untuk mencapai tujuan bersama dalam pemberantasan rokok ilegal. Sinergitas tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi, operasi gabungan, pertukaran informasi, dan pelaksanaan program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diarahkan untuk menekan peredaran rokok ilegal di Kabupaten Lumajang.

Temuan ini sama halnya dengan temuan penelitian Razak dan Utama (2025) yang menunjukkan bahwa sinergitas antara Satpol PP dan Bea Cukai dalam pemberantasan rokok ilegal dapat terwujud melalui komunikasi, koordinasi, dan pembagian tugas yang jelas. Dalam penelitian ini, komunikasi antara Satpol PP Kabupaten Lumajang dan KPPBC TMP C Probolinggo dilakukan secara formal melalui rapat koordinasi maupun secara informal melalui grup komunikasi dan koordinasi lapangan. Selain itu, pembagian tugas dalam operasi bersama juga telah dilakukan sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga sehingga mendukung efektivitas pelaksanaan penertiban rokok ilegal.

Temuan penelitian ini juga memperkuat hasil penelitian Laksono, Wulandari, dan Suhindarno (2026) yang menyatakan bahwa keberhasilan pemberantasan rokok ilegal dipengaruhi oleh kolaborasi yang terintegrasi antara pemerintah daerah, Bea Cukai, aparat keamanan, dan masyarakat. Dalam penelitian ini, sinergitas tidak hanya melibatkan Satpol PP dan KPPBC TMP C Probolinggo, tetapi juga didukung oleh pemerintah daerah, aparat penegak hukum, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan penyampaian informasi terkait peredaran rokok ilegal. Temuan ini menunjukkan bahwa pemberantasan rokok ilegal tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan keterlibatan berbagai aktor yang memiliki peran dan kewenangan berbeda.

Temuan mengenai pentingnya koordinasi dan komunikasi antarlembaga juga sejalan dengan penelitian Prasetyo, Yuhelson, dan Prasetyo (2024) yang menegaskan bahwa komunikasi yang efektif, kepercayaan antarlembaga, dan koordinasi yang berkelanjutan merupakan faktor penting dalam mengatasi peredaran barang ilegal. Dalam konteks penelitian ini, kepercayaan antara Satpol PP dan KPPBC TMP C Probolinggo tercermin dari keterbukaan dalam berbagi informasi serta kesediaan kedua instansi untuk melaksanakan operasi gabungan secara berkelanjutan. Kondisi tersebut memungkinkan proses penertiban berjalan lebih efektif karena setiap instansi memahami peran dan tanggung jawab masing-masing.

Temuan penelitian ini juga berkaitan dengan penelitian Warsono dan Koswara (2025) yang menjelaskan bahwa keberhasilan pemberantasan barang kena cukai ilegal membutuhkan koordinasi yang kuat antarinstansi penegak hukum serta dukungan regulasi yang konsisten. Pada penelitian ini, keberadaan berbagai regulasi yang mengatur pemanfaatan DBHCHT dan pelaksanaan operasi pemberantasan rokok ilegal menjadi dasar bagi Satpol PP dan KPPBC TMP C Probolinggo dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, sinergitas kelembagaan tidak hanya didukung oleh hubungan kerja yang baik, tetapi juga oleh kerangka regulasi yang memberikan kepastian dalam pelaksanaan tugas.

Namun demikian, temuan penelitian ini berbeda dengan penelitian Maulana, Syamsuadi, dan Hartati (2023) yang lebih menitikberatkan pada efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Bea Cukai melalui operasi pasar, sosialisasi, dan program Gempur Rokok

Ilegal. Penelitian ini menemukan bahwa keberhasilan pemberantasan rokok ilegal tidak hanya ditentukan oleh efektivitas pengawasan Bea Cukai semata, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas sinergitas antara Bea Cukai dan pemerintah daerah, khususnya Satpol PP sebagai perangkat daerah yang memiliki kedekatan dengan wilayah dan masyarakat. Dengan kata lain, faktor kolaborasi kelembagaan menjadi elemen yang sama pentingnya dengan fungsi pengawasan itu sendiri.

Selain keberhasilan yang telah dicapai, penelitian ini menemukan adanya beberapa faktor penghambat yang memengaruhi optimalisasi sinergitas, yaitu keterbatasan jumlah personel, luasnya wilayah pengawasan, keterbatasan anggaran operasional, serta masih adanya masyarakat yang belum memahami ciri-ciri rokok ilegal. Temuan ini sama halnya dengan penelitian Razak dan Utama (2025) yang menemukan bahwa keterbatasan sumber daya manusia menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan sinergitas antara Satpol PP dan Bea Cukai. Akan tetapi, penelitian ini memperluas temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa hambatan tidak hanya berasal dari aspek internal organisasi, tetapi juga dari faktor eksternal berupa rendahnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya dan dampak peredaran rokok ilegal.

Temuan lain yang menarik dalam penelitian ini adalah adanya kreativitas kedua instansi dalam mengembangkan strategi pencegahan melalui pemanfaatan media sosial, sosialisasi berbasis komunitas, dan pendekatan edukatif kepada masyarakat. Temuan ini memperluas penelitian terdahulu yang sebagian besar berfokus pada aspek koordinasi dan pengawasan. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan sinergitas tidak hanya ditentukan oleh komunikasi dan koordinasi, tetapi juga oleh kemampuan instansi untuk beradaptasi dan mengembangkan inovasi dalam menghadapi dinamika peredaran rokok ilegal.

Berdasarkan hasil diskusi tersebut, dapat disimpulkan bahwa temuan penelitian ini memperkuat berbagai penelitian sebelumnya mengenai pentingnya komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dalam pemberantasan rokok ilegal. Namun demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dengan menunjukkan bahwa sinergitas antara Satpol PP dan KPPBC TMP C Probolinggo tidak hanya dibangun melalui hubungan kelembagaan formal, tetapi juga melalui komitmen bersama, kreativitas dalam pelaksanaan program, serta keterlibatan berbagai pemangku kepentingan di tingkat lokal. Oleh karena itu, sinergitas antarlembaga menjadi faktor strategis dalam meningkatkan efektivitas pemberantasan terkait peredaran rokok illegal yang berada pada jangkauan lokasi Kabupaten Lumajang.

3.5 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan bahwa keberhasilan sinergitas Satpol PP Kabupaten Lumajang dan KPPBC TMP C Probolinggo tidak hanya dipengaruhi oleh komunikasi dan koordinasi, tetapi juga didukung landasan hukum yang jelas serta pemanfaatan DBHCHT. Dukungan ini memungkinkan optimalisasi operasi gabungan, sosialisasi, serta penguatan sarana dan prasarana pemberantasan rokok ilegal.

Satpol PP memiliki peran strategis sebagai penghubung antara kewenangan teknis Bea Cukai dan kondisi masyarakat lokal. Kedekatan dengan masyarakat mempermudah pengumpulan informasi, pemetaan peredaran, dan pelaksanaan operasi di lapangan, sehingga penindakan lebih efektif.

Namun, terdapat hambatan berupa kebocoran informasi operasi dan kompleksitas jaringan distribusi rokok ilegal. Banyak pelaku hanya berperan sebagai perantara sehingga penindakan sering berhenti pada pelaku tingkat bawah dan belum menyentuh jaringan utama.

Selain itu, tingginya permintaan rokok murah turut mendorong peredaran rokok ilegal. Karena itu, pemberantasan tidak cukup melalui penindakan, tetapi juga perlu edukasi, peningkatan kesadaran hukum, dan partisipasi masyarakat agar tidak menjadi pasar bagi produk ilegal.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa sinergitas antara Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lumajang dan KPPBC Tipe Madya Pabean C Probolinggo dalam memberantas peredaran rokok ilegal telah berjalan melalui mekanisme komunikasi efektif, umpan balik, kepercayaan, dan kreativitas. Sinergitas tersebut tercermin dalam pelaksanaan operasi gabungan, pertukaran informasi, pembagian tugas sesuai kewenangan, evaluasi bersama, serta pemanfaatan SIROLEG dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Pada dimensi komunikasi, koordinasi dan penyampaian informasi telah berjalan cukup intensif meskipun masih terdapat hambatan berupa kebocoran informasi dan ketidaksinkronan penyebaran informasi di lapangan. Pada dimensi umpan balik, evaluasi bersama telah dilakukan secara berkala, namun pemanfaatan sistem pelaporan belum optimal. Pada dimensi kepercayaan, hubungan antarinstansi telah terbangun dengan baik melalui keterbukaan informasi operasional dan profesionalisme sesuai kewenangan. Pada dimensi kreativitas, inovasi telah diwujudkan melalui pemanfaatan SIROLEG serta kegiatan sosialisasi, meskipun implementasinya belum sepenuhnya maksimal.

Meskipun demikian, sinergitas tersebut masih menghadapi hambatan berupa keterbatasan sumber daya manusia, kebocoran informasi operasi, rendahnya kesadaran masyarakat, serta kompleksitas jaringan distribusi rokok ilegal. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas sinergitas diperlukan melalui penguatan koordinasi lintas instansi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, optimalisasi sistem informasi, pengamanan informasi operasi, serta penguatan edukasi dan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan rokok ilegal di Kabupaten Lumajang.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ruang lingkup lokus yang difokuskan pada Kabupaten Lumajang, khususnya pada sinergitas antara Satpol PP Kabupaten Lumajang dan KPPBC Tipe Madya Pabean C Probolinggo dalam pemberantasan peredaran rokok ilegal. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sehingga temuan lebih menekankan pada pemahaman mendalam mengenai proses sinergitas, pola komunikasi, koordinasi, kepercayaan, dan kreativitas antarinstansi, bukan pada pengukuran kuantitatif terhadap tingkat efektivitas secara statistik. Selain itu, penelitian ini terbatas pada perspektif informan yang terlibat langsung dalam pelaksanaan operasi dan koordinasi, sehingga hasilnya bergantung pada kedalaman informasi yang diperoleh di lapangan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan memperluas lokus pada wilayah lain yang memiliki permasalahan serupa terkait peredaran rokok ilegal untuk melihat perbandingan pola sinergitas antara pemerintah daerah dan instansi vertikal seperti Bea Cukai. Penelitian berikutnya juga dapat mengembangkan model pengukuran tingkat sinergitas antarinstansi yang lebih kuantitatif berdasarkan indikator komunikasi efektif, umpan balik, kepercayaan, dan kreativitas agar dapat dijadikan instrumen evaluasi kinerja kolaborasi kelembagaan secara lebih terukur. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengkaji efektivitas pemanfaatan sistem informasi seperti SIROLEG secara lebih mendalam untuk menilai kontribusinya terhadap percepatan penanganan rokok ilegal di berbagai daerah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang, KPPBC TMP C Probolinggo, Satpol PP Kabupaten Lumajang, masyarakat dan pemilik took/usaha yang terlibat menjadi informan, serta seluruh pihak yang telah memberikan kesempatan, informasi, dukungan, dan bantuan selama pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Arda, J. R. Y., & Santiago, A. J. A. (2023). Strengthening policies and structures to combat illicit tobacco trade in the Philippines. Frontiers in Public Health. DOI: https://doi.org/10.3389/fpubh.2023.1089853

Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2006). The design and implementation of cross-sector collaborations: Propositions from the literature. Public Administration Review, 66(s1), 44–55. DOI : https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00665.x

Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (5th ed.). Sage Publications.

Covey, S. R. (1989). The 7 habits of highly effective people. Simon & Schuster.

Djohan, D. (2015). Manajemen pemerintahan daerah. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Joossens, L., & Gilmore, A. B. (2017). Graduated sovereignty and global governance gaps: Special economic zones and the illicit trade in tobacco products. Political Geography. DOI : https://doi.org/10.1016/j.polgeo.2017.03.002

KPPBC Tipe Madya Pabean C Probolinggo. (2026). Data dan laporan operasi pemberantasan rokok ilegal Kabupaten Lumajang.

Labolo, M. (2014). Memahami ilmu pemerintahan: Suatu kajian, teori, konsep, dan pengembangannya. Rajawali Pers.

Laksono, B. S., Wulandari, S., & Suhindarno, H. (2026). Collaborative synergy between customs and the government in the program to combat illegal cigarettes. Jurnal Administrasi Publik. DOI : https://doi.org/10.37606/publik.v13i1.2211

Lee, J. et al. (2021). Collaborative governance and inter-organizational coordination in law enforcement.

Maulana, H., Syamsuadi, A., & Hartati, S. (2023). Efektivitas pengawasan rokok ilegal pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Provinsi Riau. Jurnal SUMUR. DOI : https://doi.org/10.58794/sumur.v1i1.464

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). Sage Publications.

Moleong, L. J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. PT Remaja Rosdakarya.

Ndraha, T. (2011). Kybernology (ilmu pemerintahan baru). Rineka Cipta.

Prasetyo, H., Yuhelson, & Prasetyo, D. A. (2024). Sinergitas Bea Cukai dan Baharkam Polri dalam mengatasi peredaran barang-barang ilegal dan berbahaya. Journal of Innovation Research and Knowledge. DOI : https://doi.org/10.53625/jirk.v4i1.7847

Provan, K. G., & Kenis, P. (2008). Modes of network governance: Structure, management, and effectiveness. *Journal of Public Administration Research and Theory, 18*(2), 229–252. DOI : https://doi.org/10.1093/jopart/mum015

Razak, H. A. S., & Utama, L. S. (2025). Sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Bea Cukai dalam pemberantasan rokok ilegal di Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah. Journal of Innovation Research and Knowledge. DOI : https://doi.org/10.53625/jirk.v5i1.10313

Samudro, E. G., Sjamsoeddin, S., & Santoso, A. (2024). Sistem deteksi dini dalam pencegahan konflik sosial di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Soekanto, S. (2006). Sosiologi: Suatu pengantar. Rajawali Pers.

Sugiyono. (2023). Metode penelitian kualitatif. Alfabeta.

Suyono, H., & Lismawati, L. (2024). Development of a model for social conflict intentions in

urban communities as early warning systems. Journal of Educational, Health and Community Psychology. DOI : https://doi.org/10.12928/jehcp.v13i2.28668

Ulep, V. G., Lavares, M. P., & Francisco, A. (2021). Measuring the capacity to combat illicit tobacco trade in 160 countries. Globalization and Health. DOI: https://doi.org/10.1186/s12992-021-00783-4

Warsono, T., & Koswara, I. Y. (2025). Penegakan hukum peredaran MMEA dan rokok ilegal dalam perspektif pemidanaan. Mimbar Justitia. DOI : https://doi.org/10.35194/jhmj.v11i1.5161

Wasistiono, S. (2003). Kapita selekta penyelenggaraan pemerintahan daerah. Fokusmedia.

Wasistiono, S., & Tahir, I. (2006). Prospek pengembangan desa. Fokusmedia.

INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
BHINNEKA TUNGGAL IKA
1956